

## **PENGARUH KONSENTRASI PENDUDUK INDONESIA DI PULAU JAWA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Asep Fikri Nur Arif<sup>1</sup>, Nunung Nurwati<sup>2</sup>

[asep19002@mail.unpad.ac.id](mailto:asep19002@mail.unpad.ac.id), [nngnurwati@yahoo.co.id](mailto:nngnurwati@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

*Konsentrasi penduduk Indonesia yang berada di Pulau Jawa hingga mencapai jumlah 56,10% lambat laun akan memberikan banyak efek negatif bagi masyarakat sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan dengan pulau lain, salah satu faktor utamanya adalah pull factor Pulau Jawa yang memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut seperti menambah jumlah pengangguran karena lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan yang mencari kerja hingga meningkatnya tingkat kriminalitas yang terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti makanan. Pendekatan melalui social justice theory yang digunakan dalam artikel ini memberikan penjelasan serta solusi yang linear dengan permasalahan yang dihadapi, opsi yang dapat dilakukan seperti percepatan pembangunan di luar Pulau Jawa, transmigrasi ke luar Jawa hingga pengetatan peraturan di ranah demografi seperti pengetatan usia minimal nikah, program keluarga berencana untuk menekan angka kelahiran, dan pengetatan aturan imigrasi antar pulau dapat dijadikan opsi untuk mencapai keadilan serta kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

**KATA KUNCI:** konsentrasi penduduk, teori keadilan sosial, pemerataan pembangunan, migrasi, kesejahteraan

### **ABSTRACT**

*The concentration of Indonesia's population on the island of Java, which reaches 56.10%, will gradually have many negative effects on the people themselves. Many factors cause the population of Java Island to be more than other islands. One of the main factors is the pull factor of Java Island which has better facilities compared to other regions. The unequal distribution of the population can reduce the level of welfare of the people in the region, such as increasing the number of unemployed people because there are fewer job opportunities than those looking for work to, then increasing the level of crime that has to be done to meet basic needs such as food. The approach through social justice theory is used this article provides explanations and solutions that are linear to the problems faced, options that can be made such as accelerating development outside Java, transmigration outside Java to tightening regulations in the demographic realm such as tightening the minimum age for marriage, family planning programs to reduce birth rates, and tightening the rules of immigration between islands can be an option to achieve justice and social equality for all Indonesians.*

**KEYWORDS:** population concentration, social justice theory, equitable development, migration, welfare

<sup>1</sup> Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup> Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal akan senantiasa berada dalam keadaan dinamis selama perjalanan hidupnya seperti dengan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya atau sering kita sebut dengan istilah adaptasi, tetapi adaptasi juga dapat berarti dimana manusia mengubah keadaan lingkungan agar sesuai dengan individu tersebut (Gerungan, 1991), penyesuaian dapat menyangkut norma dan nilai yang berlaku pada suatu lingkungan sosial. Artinya dalam proses adaptasi, manusia dapat berperan secara pasif maupun aktif.

Urbanisasi yang menjadi bagian dari kegiatan migrasi dalam demografi dapat diartikan secara umum sebagai perpindahan atau mobilisasi penduduk dari desa menuju perkotaan (proses pengkotaan) (Haris, 2015) atau dapat juga didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang tinggal di area perkotaan (Tjiptoherijanto, 1999) merupakan salah satu bentuk adaptasi manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan disekitarnya. Kegiatan urbanisasi yang merupakan bagian dari migrasi penduduk dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, yakni faktor pendorong tempat asal (*push factor*) dan faktor penarik tempat tujuan (*pull factor*).

Berkaitan mengenai penduduk, melansir hasil sensus penduduk 2020 lalu yang dilakukan pemerintah, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling besar nomor empat di dunia dengan jumlah 270,20 juta jiwa (BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 No. 7/01/Th. XXIV, 2021) meskipun laju penduduk di Indonesia dalam satu dekade terakhir menurun 0,24% dari 1,49% pada periode 2000-2010 menjadi 1,25% pada periode selanjutnya 2010-2020. Namun, dari banyaknya penduduk tersebut dengan luas negara Indonesia yang mencapai 1,905 juta km<sup>2</sup>, persebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata dimana 56,10% dari total penduduknya terkonsentrasi di pulau Jawa yang hanya sebesar 7% dari total wilayah di Indonesia (BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 No. 7/01/Th. XXIV, 2021).

Terdapat banyak asumsi mengapa penyebaran penduduk di Indonesia terkonsentrasi lebih dari setengahnya di Pulau Jawa. Jika ditinjau menggunakan teori Lee mengenai faktor pendorong suatu daerah dijadikan tujuan untuk berpindah oleh penduduk (A, Istiyani, & Widjajanti, 2017), maka pulau jawa hampir memiliki semua yang dibutuhkan sehingga menjadi permata yang menarik bagi penduduk diluar pulau untuk mencoba peruntungan di Pulau Jawa.

Persebaran penduduk yang tidak merata seperti sekarang ini mencerminkan keadilan sosial yang rendah karena tidak semua instrument yang dibutuhkan oleh penduduk tersedia di seluruh bagian Indonesia secara merata, sehingga kondisi infrastruktur di luar Pulau Jawa belum memiliki fasilitas dan aksesibilitas sebaik Pulau Jawa. Kemudian, pemadatan penduduk di satu tempat tertentu juga akan menimbulkan berbagai akibat negatif yang muncul sebagai masalah sosial seperti pemukiman kumuh penduduk, tingkat sanitasi penduduk yang rendah, pengangguran, tingginya angka kriminalitas hingga pencemaran lingkungan akibat penggunaan bantaran sungai sebagai tempat tinggal.

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana hubungan kepadatan penduduk yang terjadi di Pulau Jawa, apa saja faktor penarik yang dimiliki serta implikasi negatif yang terjadi jika pemerataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia tidak segera dilakukan dengan sedikit dihubungkan menggunakan teori social justice.

## **METODE**

### **i. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah menggunakan kajian pustaka yang

didasarkan pada buku, jurnal ilmiah, serta data-data dari publikasi di internet yang diambil dari situs resmi seperti halaman web BPS, Disdukcapil, Kemendesra serta beberapa berita dari media terkemuka nasional seperti Kompas.com untuk mencari referensi yang relevan sebagai landasan yang kuat dalam pembuatan artikel ini. Setelah mendapatkan referensi yang tepat, untuk menjelaskan korelasi antara konsentrasi penduduk dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, penulis menggunakan metode deskriptif untuk mencari fakta kemudian menginterpretasikan fakta tersebut dengan tepat (Whitney, 1960). Metode ini sangat tepat untuk memandang fenomena konsentrasi kepadatan penduduk melalui teori social justice karena akan melihat korelasi antar variabel secara sistematis, faktual dan akurat.

### **ii. Studi kepustakaan**

#### ***Teori Social Justice***

Keadilan sosial selalu dibicarakan oleh manusia dan menjadi utopia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Berbagai cara telah, sedang dan akan dilakukan untuk mencapai keadaan ideal yang kita sebut *keadilan sosial*. Konsep keadilan merupakan konsep yang luas dan sangat kontekstual, tergantung dari sudut pandang mana dan latar belakang apa yang kita bawa

dalam mengaplikasikan konsep keadilan tersebut.

Ketika menyinggung mengenai keadilan sosial, salah satu tokoh terkenal yang memiliki pemikiran tajam mengenai hal ini adalah John Rawls yang dituangkan dalam salah satu bukunya yakni *A Theory of Justice*. Dalam bukunya Rawls membahas mengenai Justice as Fairness. Rawls berargumen bahwa dua konsep yakni liberty dan equality dapat diadakan menjadi satu prinsip keadilan. "setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan jika terjadi ketidakadilan maka kamu yang tertinggal yang harus diuntungkan" (Anggara, 2013).

Konteks keadilan sosial selalu dijunjung tinggi oleh pekerja sosial sebagai salah satu prinsip utama (Laras, 2017), dimana salah satu tujuan dan bidang utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan yang sama terhadap seluruh elemen masyarakat di tingkat mikro, mezzo maupun makro (Huripah, 2014). Konsep keadilan sosial muncul karena terdapat kelompok dalam masyarakat yang tidak mendapatkan hak yang setara dengan kelompok masyarakat lain. Dalam konteks yang dibahas oleh artikel ini, konsentrasi penduduk di Pulau Jawa dipicu oleh dan memicu untuk timbulnya ketidakadilan sosial.

Oleh karena itu, pendekatan melalui teori keadilan sosial yang khususnya dikemukakan oleh Rawls akan sangat tepat untuk menjelaskan korelasi antara konsentrasi penduduk, pembangunan tidak merata, serta kondisi perbedaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa dan penduduk yang tinggal diluar Pulau Jawa.

### ***Konsentrasi Penduduk***

Konsentrasi penduduk di Pulau Jawa hingga mencapai 56,1% atau 151,6 juta jiwa dari total jumlah penduduk di Indonesia bukan tanpa alasan. Meskipun jumlah ini sudah cukup lumayan menurun dari dua dekade sebelumnya yakni 59,1% pada Sensus Penduduk 2000 (BPS, Hasil Sensus Penduduk 2000 No.26/V/3 Juni, 2002) dan 57,5% pada Sensus Penduduk 2010 (Thomas V. F., 2021). Faktor ketimpangan pembangunan infrastruktur, pemerataan distribusi pusat ekonomi, serta kemudahan aksesibilitas akan pusat pelayanan yang digunakan oleh masyarakat menjadi faktor penarik yang sangat kuat bagi penduduk di luar Pulau Jawa untuk melakukan Urbanisasi. Belum lagi ditambah oleh faktor pendorong yang berasal dari tempat asal (pedesaan) seperti keadaan desa yang umumnya mempunyai kehidupan yang statis, kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja yang relative

homogen, serta banyak faktor lain (Suntajaya, 2014) yang menimbulkan keinginan bagi penduduk desa maupun kota di Luar Pulau Jawa untuk bermigrasi keluar. Pemerataan penduduk yang tidak merata ini dapat menyebabkan akibat positif dan negatif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi nampaknya dampak negatif saat ini lebih banyak dialami daripada akibat positifnya.

### ***Pemerataan Pembangunan***

Bukan hanya ketimpangan yang terjadi diantara pembangunan dan perkotaan, tetapi kesenjangan juga terjadi di wilayah Pulau Jawa dan wilayah luar Pulau Jawa (Bhinadi, 2003) ketimpangan pemerataan pembangunan ini memiliki konsekuensi terhadap kesenjangan pembangunan karena hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja. Tentu keberadaan Ibu Kota Negara di Pulau Jawa menyebabkan terpusatnya ekonomi pulau ini, kondisi geografis di Indonesia yang terdiri dari lima pulau besar yang terpisah lautan juga menjadi hambatan dalam distribusi bahan-bahan untuk pembangunan infrastruktur. Terdapat korelasi antara konsentrasi penduduk di pulau tertentu, kesenjangan pembangunan dan perbedaan kesejahteraan penduduknya.

### ***Kesejahteraan Penduduk***

Urbanisasi besar-besaran yang dilakukan penduduk pulau lain di Indonesia ke Pulau Jawa yang menyebabkan kepadatan hingga 1.171 jiwa per km per segi yang bahkan lebih buruk dari kepadatan nasional yang berada di angka 141 per km per segi, artinya kepadatan penduduk di Jawa 8,3 kali lipat dari jumlah kepadatan nasional (Thomas V. F., 2021) dengan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh penduduk yang bermigrasi ke kota-kota besar di Pulau Jawa menyebabkan para migran tidak dapat mencapai kehidupan ideal mereka, sebaliknya banyak masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan lain karena tidak mendapatkan pekerjaan yang ideal di tempat tujuan, kemudian masalah kemiskinan juga menyebabkan permasalahan sosial lain seperti banyaknya pemukiman liar yang kumuh hingga meningkatnya tingkat kriminalitas.

### ***Ekonomi***

Banyak sekali aspek perilaku manusia, apalagi migrasi ke kota-kota besar di latar belakang oleh aspek ekonomi. Kembali, di sektor inipun kelompok provinsi yang ada di Pulau Jawa memberikan sumbangsih besar dengan 59,14 persen dari perekonomian nasional, disusul Pulau Sumatera dengan 8,12 persen, Sulawesi dengan 6,19 persen,

kemudian Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95 persen, sementara kelompok Provinsi di Pulau Papua dan Maluku memberikan sumbangsih paling kecil diantara pulau lain di Indonesia (BPS, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triulan I-2020 No.39/06/Th. XXIII, 5 Mei 2020, 2020). Ketimpangan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur sehingga penduduk yang berasal dari daerah yang memiliki infrastruktur kurang memadai akan memiliki ketertarikan untuk berpindah ke daerah yang memiliki fasilitas lebih lengkap, sehingga selama masih terjadi ketimpangan di sektor ekonomi dan pembangunan, masalah mengenai distribusi dan konsentrasi penduduk akan sulit teratasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki luas wilayah tidak sampai 10 persen dari total luas wilayah Indonesia, tetapi mirisnya pulau ini ditempati lebih dari setengah penduduk indonensia dengan 56,10 persen diantaranya bermukim di Pulau Jawa, hal ini berarti 43,90 lainnya tinggal di lebih dari 90 persen wilayah Indonesia. Akan banyak sekali akibat yang timbul karena konsentrasi penduduk pada satu pulau saja, baik itu akibat yang bersifat menguntungkan ataupun merugikan.

Daerah tujuan migran risen didominasi oleh daerah daerah yang berada di Pulau Jawa dengan total 54,3% dimana Provinsi Jawa Barat menjadi tujuan paling populer dengan 19,7 persen diantaranya (Saputra & Budiarti, 2017). Pulau Jawa menjadi destinasi favorit memiliki banyak sekali faktor penarik (pull factor) yang diharapkan akan memberikan nilai keuntungan jika migran berpindah ke tempat tersebut, dalam konteks ini Pulau Jawa, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lee (Erlando, 2014). Melansir data dari BPS, peningkatan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dari tahun 2000-2015 bertambah cukup signifikan dengan peningkatan sekitar 18% (Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2015, n.d.).

Konsentrasi penduduk berlebihan didorong oleh beberapa faktor penarik dari daerah tujuan, ketidkakseimbangan pembangunan menyebabkan ketersediaan sumber-sumber mata pencaharian terpusat di satu daerah, fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan, ataupun aksesibilitas seperti jarak dan kualitas jalan untuk fasilitas publik tersebut dapat dijadikan alasan mengapa banyak penduduk luar Pulau Jawa melakukan migrasi lokal ke Jawa.

## **Faktor penyebab terjadi konsentrasi penduduk di Pulau Jawa**

### ***a. Ketersediaan Lapangan Kerja***

Keberadaan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia di Pulau Jawa menjadikan Jawa sebagai pusat pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Berbagai macam fasilitas mulai dari kesehatan hingga birokrasi. Menjadi pusat perekonomian dengan kontribusi Pulau Jawa sebesar 58,55% (BPS, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 No. 64/08/Th. XXIII, 2020) membuat Jawa menjadi potensial akan ketersediaan lapangan kerja yang luas sehingga menarik banyak penduduk dari luar pulau untuk mencoba peruntungan. Pusat industri negara ini yang sebagian besar berada di daerah Jabodetabek secara tidak langsung membuka peluang untuk lapangan kerja yang lebih besar. Kawasan industri seperti karawang yang hingga tahun 2018 lalu memiliki lahan industri hingga 13.756.358 hektar persegi menurut data dari Disnakertrans dengan jumlah 1.762 pabrik. Diambil dari satu Kawasan industri tersebut saja, dapat dibayangkan seberapa besar potensi yang dapat dimanfaatkan oleh

penduduk untuk mengadu nasib dan mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Tidak hanya itu, pembangunan pusat industri, jalan raya dan pusat fasilitas lainnya juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri otomatis membuka lapangan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan para karyawan tersebut. Banyak pengusaha dari minang yang membuka usaha Nasi Padang untuk memenuhi kebutuhan akan makanan para karyawan, atau mereka yang berjualan pakaian. Pembukaan lapangan pekerjaan sampingan ini merupakan salah satu dampak positif kecil yang dapat disorot dari banyaknya akibat negatif lain yang akan timbul.

Terkhusus untuk beberapa daerah industri utama di Indonesia seperti DKI Jakarta, Banten, dan sebagian kota di Provinsi Jawa barat memiliki upah minimum yang tinggi dibandingkan daerah perkotaan atau kabupaten lain di Indonesia. Hal yang dipaparkan diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar Jawa untuk

mencari pekerjaan keluar daerah mereka dan menetapkan Jawa terutama Jabodetabek sebagai destinasi yang sempurna dengan keistimewaan yang dimilikinya.

**b. Kelengkapan Fasilitas Publik Seperti Pendidikan dan Kesehatan**

Melansir dari Katadata.id yang bersumber dari Kemenkes RI 2019 membuktikan bahwa 5 Provinsi teratas dengan jumlah rumah sakit terbanyak 4 diantaranya berasal dari Pulau Jawa (Kusnandar, 2019). Fasilitas kesehatan yang menjadi penunjang kehidupan manusia dalam kelangsungan hidupnya memiliki peranan penting dalam menjadi indikator penarik bagi penduduk untuk bermigrasi atau bertempat tinggal di Pulau Jawa. Keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai akan memberikan rasa aman dan menjadi nilai tersendiri bagi setiap penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Kemudian ketersediaan fasilitas pendidikan di Pulau Jawa terutama pendidikan dasar hingga SMA relatif lebih baik dan berjumlah lebih banyak, di kota besar di Jawa seperti Bandung misalkan, jumlah SMA Negeri maupun Swasta sangat banyak sekali hingga masyarakat

memiliki banyak pilihan untuk anak mereka melanjutkan jenjang pendidikan. Belum lagi, sebagian besar universitas top negeri ini berada di Pulau Jawa, sebut saja ITB, Universitas IPB, hingga Universitas Indonesia.

**c. Aksesibilitas**

Dengan banyaknya fasilitas pendidikan, kesehatan serta didukung dengan jalan raya maupun jalan tol yang lebih bagus akan memberikan aksesibilitas yang mudah. Keperluan penduduk untuk menjangkau keperluan sehari-hari mereka tidak harus melalui jarak tempuh yang jauh serta kualitas jalan yang tidak sesuai, kemudahan tersebut merupakan sebuah sistem sumber untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pada awalnya, faktor-faktor penarik tersebut disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup terasa antara Jawa dan daerah pulau lainnya yang mendorong pindahnya para penduduk. Pembangunan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya lebih cepat karena faktor distribusi melalui aksesibilitas jalan yang baik melalui darat dari pusat (Jakarta dan Banten) lebih cepat terdistribusikan. Belum lagi faktor pendorong yang berasal

dari tempat asal penduduk luar Jawa yang juga memiliki peranan dalam berpindahnya penduduk ke tempat tujuan.

Padatnya pendudu di Pulau Jawa mencerminkan terdapat ketidakseimbangan kondisi ekonomi, sosial dan lainnya dengan pulau lain. Jika semua daerah memiliki pemerataan yang sama dalam segala sektor maka urbanisasi besar-besaran ke Pulau Jawa akan menurun drastis karena di tempat lain pun apa yang penduduk butuhkan sudah tersedia.

### **Permasalahan yang timbul akibat padatnya penduduk**

#### **a. Permasalahan lingkungan hidup**

##### **- Pembabatan hutan untuk lahan pemukiman**

Lebih banyak penduduk tentu akan menuntut untuk lahan yang lebih luas bagi tempat tinggalnya. Pembukaan lahan baru tentu juga harus mengorbankan ekosistem yang lain, seperti pembabatan hutan untuk pembukaan lahan pemukiman yang baru. Banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun di area pedesaan maupun pinggiran perkotaan yang memiliki akses yang dekat dengan pabrik-pabrik maupun jalan tol yang memberikan akses instan ke pusat kota. Pembabatan hutan ini

mengurangi wilayah resapan alami sehingga berkontribusi untuk munculnya bencana banjir dan longsor.

##### **- Penggunaan bantaran sungai untuk wilayah pemukiman**

Disamping pembabatan hutan untuk pembukaan wilayah pemukiman, acapkali di kota besar banyak ditemukan pemukiman liar di bantaran sungai. Kesejahteraan yang awalnya diimpikan oleh mereka yang bermigrasi berbanding terbalik dengan realita, karena ketidaksiapan secara keterampilan untuk mendukung mereka bekerja di sektor yang layak maka ketika mereka sampai di daerah tujuan tidak berhasil untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak sehingga kebutuhan untuk tempat tinggal malah menggunakan bantaran sungai yang mengganggu keseimbangan alam.

##### **- Polusi**

Banyaknya jumlah penduduk akan juga menambah limbah yang diproduksi karena aktivitas sehari-hari, seperti limbah rumah tangga. Kemudian jumlah kendaraan yang bermotor juga akan memberikan polusi tambahan serta kemacetan yang sudah familiar terlihat di

beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung.

Lambat laun beberapa permasalahan lingkungan hidup diatas akan mempengaruhi keadaan pulau jawa secara alamiah yang merupakan tanah yang subur, akan berangsur sedikit demi sedikit merusak keseimbangan alam yang kembali akan merugikan manusia yang berada didalamnya.

#### ***b. Menambah angka pengangguran dan kriminalitas***

Melansir data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi yang berada di Pulau Jawa masih cukup tinggi dengan 10,95 persen di DKI Jakarta, 10,46 persen di Jawa Barat, dan 10,64 untuk Provinsi Banten (Badan Pusat Statistik: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020, n.d.) yang notabene merupakan daerah industri utama di Pulau Jawa. Ketidaksiapan penduduk dari segi latar belakang pendidikan dan keterampilan saat mendatangi daerah tujuan membuat mereka kesulitan untuk mencapai tujuan yang awalnya diidamkan. Kekurangan pada latarbelakang tersebut berpotensi menambah jumlah pengangguran di Jawa Barat.

Ketika kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi harus tetap makan maka salah satu pilihan paling buruk untuk diambil adalah dengan melakukan kejahatan atau kriminalitas. Diatambah lagi keadaan pandemi seperti sekarang ini, bukan hanya pengangguran yang kesulitan mencari pekerjaan tetapi mereka yang sudah memiliki pekerjaan pun sebagian di PHK. Banyak sekali kejahatan yang dilatarbelakangi karena tidak memiliki pekerjaan, pembukaan sektor lapangan kerja yang lebih luas dan merata dituntut untuk memperbaiki permasalahan ini.

#### **Hubungan antara padatnya penduduk di Pulau Jawa dengan kesejahteraan masyarakat**

Permasalahan diatas muncul akibat pemadatan penduduk yang memenuhi Pulau Jawa. Dengan munculnya permasalahan seperti perusakan hutan demi pembangunan perumahan, penggunaan bantaran sungai sebagai lahan untuk tinggal, hingga bertambahnya jumlah berbagai macam polusi akibat limbah rumah tangga, plastic maupun bertambahnya jumlah kendaraan yang kian membludak terutama di kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta dan Bandung akan berefek secara langsung terhadap

kesejahteraan penduduk di Pulau Jawa sendiri.

Padatnya penduduk di daerah tertentu menaikkan daya saing untuk mendapatkan pekerjaan, lapangan-lapangan pekerjaan yang jumlahnya terbatas diminati oleh pendaftar yang jumlahnya jauh-jauh lebih banyak. Seperti halnya hukum ekonomi, dimana demand > supply akan menyebabkan kelangkaan, dalam konteks ini kelangkaan lapangan kerja yang proper dengan kebanyakan penduduk menjadi masalahnya.

Ketika tidak mendapatkan pekerjaan maka akan menimbulkan permasalahan lain seperti kemiskinan, kemiskinan akan menyebabkan banyak masalah lain seperti tidak mampu mencukupi kebutuhan makanan yang bergizi hingga menghambat pendidikan anak untuk melanjutkan sekolahnya. Permasalahan yang muncul yang berakar dari kepadatan penduduk tersebut menyebabkan menurunnya kesejahteraan penduduk hingga menghambat mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial.

Banyaknya penduduk di suatu tempat juga akan mempengaruhi konsumsi akan kebutuhan pangan yang lebih besar, mahalnya harga beras dan terbatasnya pendapatan setiap penduduk kembali

menjadi masalah jika suatu waktu tidak dapat terpenuhi dengan layak. Kebutuhan akan pangan utama seperti beras akan sangat sulit didapatkan kedepannya jika konsentrasi penduduk tidak segera dilakukan pemerataan, karena lahan pertanian yang terus diganti untuk pembuatan pemukiman akan menurunkan kuantitas produksi beras sehingga berpotensi memunculkan krisis pangan.

Meski pemerintah sudah mengadakan bantuan melalui kartu Indonesia Sejahtera, tetapi karena data yang terus diperbaharui masih banyak sekali warga Indonesia yang kekurangan makan dan berstatus kelaparan. Tercatat oleh Global Hunger Index (GHI), Indonesia menempati ranking ke 70 dari 107 negara, dengan indeks 19.1 berada di angka pertengahan dan hampir menyentuh serius (20.0) (Global Hunger Index > Indonesia, 2021). Mengingat Indonesia yang merupakan negara agraris yang pernah menjadi negara Swasembada beras pada zaman orde baru dulu, hal ini cukup miris karena saat ini kita tidak mampu memberikan makanan utama berupa beras kepada rakyat sebagai bentuk pemenuhan kecukupan dasarnya.

Kebutuhan akan air bersih dan sanitasi yang layak menjadi salah satu yang harus diperhatikan dalam keadaan

terkonsentrasinya penduduk yang berada di Pulau Jawa. Bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai dan tidak memiliki sumber air tawar yang bersih akan berdampak terhadap kesehatan fisik mereka, ketika terjadi penyakit seperti diare atau penyakit kulit akibat penggunaan air yang tidak higienis maka akan berpengaruh terhadap keberfungsian mereka dalam bekerja ataupun sekolah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik dan akhirnya mengganggu kesejahteraan mereka untuk hidup layak.

### ***Pandangan melalui Social Justice Theory***

Bagi John Rawls, keadilan merupakan jantung dalam institusi sosial seperti halnya kebenaran dalam sistem pemikiran (Alwino, 2016) teori keadilan Rawls merupakan teori abstraktif yang terbebas dari kepentingan, ambisi dan ideologi apapun (liberal dan sosialis). Bagi Rawls. Liberalisma ala Locke membenarkan ketimpangan sosial, dan sosialisme Marx memotong kebebasan-kebebasan dasar, atas dasar tersebut Rawls mencoba menyusun sebuah teori yang dapat mencakup dan mengakomodasi kebebasan dasar dan kesetaraan sosial sekaligus. Kemudian dikemukakanlah konsep *justice as fairness*, yang menghasilkan keadilan sebagai hasil dari tawar menawar yang adil. Dari konsep

tersebut dapat ditarik bahwa Rawls berharap ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan cara tawar menawar yang adil sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan yang sama bagi setiap orang dan terjadi stratifikasi sosial terbuka dengan kesempatan yang sama bagi siapapun.

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh persebaran penduduk yang tidak merata ini seharusnya dapat diatasi dengan konsep keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls. Dengan konsep *justice as fairness*, keadaan infrastruktur, aksesibilitas maupun harga akan kebutuhan sehari-hari harusnya merata di seluruh daerah di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu melakukan migrasi ke Jawa untuk mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Indonesia sebagai negara demokrasi juga dapat menerapkan konsep keadilan yang dihasilkan dari tawar menawar yang adil karena sejatinya kebijakan, peraturan perundang-undangan yang diproduksi oleh pemerintah merupakan aspirasi dan keinginan rakyat dimana rakyat yang seharusnya menentukan nasibnya sendiri. Kita sebagai rakyat harus mengambil

peranan dengan cepat dengan mendukung, mengkritisi serta mengawal peraturan dan program pemertintah agar tetap berjalan diatas pancasila dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat.

### **Kemungkinan solusi**

#### **a. Mempercepat pembangunan Luar Jawa**

Ketika setiap pulau memiliki sumber-sumber yang sama dengan Jawa, maka penduduk yang lahir diluar Jawa tidak perlu melakukan migrasi untuk memenuhi kebutuhannya karena sumber untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup sudah terdapat di daerah masing-masing. Pemerintah sejak 2014 lalu terus menggenjot pembangunan infrastruktur agar masyarakat merasakan keadilan yang sama, pemindahan ibukota ke Kalimantan pada satu sisi memiliki nilai positif agar Jakarta yang sudah terlalu padat dapat direlaksasi dan mendorong retransmigrasi keluar Jakarta, terkhusus Pulau Jawa.

Di sektor pendidikan, bantuan-bantuan terhadap PTNBH di Jawa sudah mulai dikurangi dan di relokasi untuk perguruan tinggi diluar Pulau Jawa. Kebijakan ini

mendorong agar terjadi pemerataan kualitas perguruan tinggi Indonesia agar pulau jawa tidak menjadi destinasi favorit lagi untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan yang merata akan menghasilkan persaingan sehat untuk Sumber Daya Manusia Indonesia yang lebih baik dan dapat bersaing dengan dunia internasional.

Dengan pembangunan yang seimbang, maka lapangan kerja akan terbuka lebih besar di daerah Luar Pulau Jawa, sehingga tidak terdapat lagi ketimpangan antar provinsi dan antar pulau di Indonesia. Pembangunan tentu harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, tetap memperhatikan ekosistem lain, tidak merusak habitat satwa, tidak memproduksi limbah berlebih dan melakukan penanaman kembali agar kondisi alam tetap terjaga.

#### **b. Transmigrasi**

Ketika pembangunan, lahan, dan segala sistem sumber sudah mulai tersedia secara merata di Luar Pulau Jawa maka opsi selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan retransmigrasi penduduk jawa yang berjumlah 56% dari total jumlah

penduduk Indonesia. Banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kedaulatan rakyat, pengelolaan tambang di Papua, kekhasan makanan di Sumatra dan keindahan hutan hujan di Kalimantan dapat dimaksimalkan dan diolah oleh penduduk atau rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan, eksploitasi yang dilakukan tentu harus dipantau oleh pemerintah sebagai pembuatan kebijakan agar tetap seimbang dan tidak melakukan perusakan berlebihan.

c. Kebijakan di bidang demografi

Melakukan pengetatan peraturan mengenai usia minimal menikah untuk menekan angkat fertilitas, aturan ketat untuk mereka yang ingin mudik dan menetap di Jawa, setidaknya bagi para imigran harus dibekali keterampilan, pengetahuan dan pendidikan yang memadai agar dapat mendapat pekerjaan yang baik serta layak sehingga tidak menambah angka pengangguran dan pemukiman liar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak sekali faktor yang menyebabkan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata dan cenderung

terkonsentrasi di Pulau Jawa, mulai dari faktor sejarah yang menempatkan Ibukota Indonesia di Pulau Jawa, faktor geografis dimana tanah di Pulau Jawa cenderung lebih subur dan mudah ditanami untuk dijadikan lahan pertanian, hingga faktor penarik Pulau Jawa dengan ketersediaan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan sekolah dengan aksesibilitas yang baik. Konsentrasi penduduk ini dapat menimbulkan masalah kesejahteraan bagi penduduk karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses sistem sumber yang tersedia. Penulis menyampaikan beberapa solusi di akhir yang dapat digunakan oleh pihak terkait untuk mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata di Indonesia. Harapannya saran dan analisis yang dipandang melalui social justice theory John Rawls dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah dalam mengentaskan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan artikel ini, penulis berharap artikel ini dapat dijadikan sebagai landasan ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya, saran serta masukan dari pembaca akan sangat diterima untuk memperbaiki kekurangan dalam penulisan artikel selanjutnya. Permasalahan mengenai kepadatan penduduk perlu dijadikan salah satu perhatian utama

pemerintah karena dampak yang akan dirasakan secara laten akan benar-benar merugikan banyak orang, penanganan berjangka seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur di Luar Pulau Jawa perlu didukung sepenuhnya oleh masyarakat agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dengan mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, S. A., Istiyani, N., & Widjajanti, A. (2017). FAKTOR PENDORONG DAN PENARIK PENDUDUK MIGRAN KOTA BEKASI KE JAKARTA. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 79-82.
- Alwino, A. (2016). *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls*. Jakarta: Melintas.
- Anggara, S. (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik terhadap Demokrasi Liberal. *JISPO*, 1-10.
- Badan Pusat Statistik: *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020*. (n.d.). Retrieved from BPS: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Bhinadi, A. (2003). DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA DENGAN LUAR JAWA. *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, 39-48.
- BPS. (2002). *Hasil Sensus Penduduk 2000 No.26/V/3 Juni*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triulan I-2020 No.39/06/Th. XXIII, 5 Mei 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 No. 64/08/Th. XXIII*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020 No. 7/01/Th. XXIV*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Erlando, A. (2014). Analisis Terhadap Migran Sirkuler di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah*, 1-24.
- Gerungan, W. (1991). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Global Hunger Index > Indonesia*. (2021, October). Retrieved from Global Hunger Index:

- <https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2020/Indonesia.pdf>
- Haris, A. (2015). STUDI MEDIA DAN PERPUSTAKAAN TENTANG URBANISASI. *JUPITER*, 60-64.
- Huripah, E. (2014). Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* , 1-14.
- Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2015*. (n.d.). Retrieved from Badan Pusat Statistik:  
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842>
- Kusnandar, V. B. (2019, 10 10). *Home > Berapa Jumlah Rumah Sakit di Indonesia?* Retrieved from Katadata:  
<https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2019/10/10/berapa-jumlah-rumah-sakit-di-indonesia#>
- Laras, H. (2017). Peran Kelembagaan Pekerjaan Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Saputra, D. D., & Budiarti, W. (2017). Analisis Data Panel migrasi Masuk Risen Di Pulau Jawa dan Sumatera Periode 1995-2005. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 79-92.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suntajaya, I. G. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA URBANISASI DI PROVINSI BALI. *PIRAMIDA*, 61-70.
- Tangkudung, J. P. (2014). PROSES ADAPTASI MENURUT JENIS KELAMIN DALAM MENUNJANG STUDI MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS SAM RATULANGI. *Acta Diurna*, 1-11.
- Thomas, V. F. (2021, Januari 21). *Tirto.id*. Retrieved from Tirto.id:  
<https://tirto.id/kepadatan-penduduk-pulau-jawa-sentuh-8-kali-rata-rata-nasional-f9tP>
- Thomas, V. F. (2021, January 21). *Tirto.id*. Retrieved from Tirto.id:  
<https://tirto.id/kepadatan-penduduk-pulau-jawa-sentuh-8-kali-rata-rata-nasional-f9tP>
- Tjiptoherijanto, P. (1999). URBANISASI DAN PENEMBANGAN KOTA DI INDONESIA. *POPULASI*, 58-72.

Whitney, F. L. (1960). *the Elements of  
Research*. New York: Prentice-  
Hall.